Kumpulan Poster
SEKOLAH NEGARAWAN
(Analogi, Struktur, dan Pandangan)



INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

UNSUR NEGARA

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

UNSUR NEGARA

NEGARA

Arti Negara menurut Sekolah Negarawan

Negara adalah organisasi yang dibentuk oleh rakyat dalam suatu wilayah untuk menjalankan kedaulatannya melalui lembaga negara, aparatur negara, dan pemerintah periodik secara efektif, efisien, dan transparan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

WILAYAH

RAKYAT

Arti Rakyat menurut Sekolah Negarawan

Rakyat adalah komunitas politik pemilik kedaulatan yang membentuk negara, memberikan mandat kewenangan, serta menjadi tujuan akhir penyelenggaraan negara.

POLITIK

Arti Politik menurut Sekolah Negarawan

Politik adalah proses memperoleh, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan kewenangan dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan secara efektif, efisien, dan transparan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

LEMBAGA NEGARA

Arti Lembaga Negara menurut Sekolah Negarawan

Lembaga negara adalah struktur yang dibentuk untuk menjalankan fungsi dan kewenangan negara berdasarkan mandat konstitusional.

APARATUR NEGARA

Arti Aparatur Negara menurut Sekolah Negarawan

Aparatur negara adalah tenaga profesional yang menjalankan fungsi negara dan pemerintahan serta menjaga kontinuitas pelayanan kepada rakyat.

PEMERINTAH

Arti Pemerintah menurut Sekolah Negarawan

Pemerintah adalah kepemimpinan eksekutif yang dibentuk secara periodik dan diberi mandat oleh rakyat untuk menentukan arah kebijakan serta memimpin penyelenggaraan fungsi pemerintahan melalui aparatur negara secara efektif, efisien, dan transparan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

PENGAKUAN DARI NEGARA LAIN

SEJAHTERA

Arti Sejahtera menurut Sekolah Negarawan

Sejahtera adalah suatu kondisi dimana kebutuhan dasar seseorang atau masyarakat seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi dengan baik.

NEGARAWAN

Arti Negarawan menurut Sekolah Negarawan

Negarawan adalah pribadi yang bijaksana, berwibawa, visioner, serta menguasai ilmu kenegaraan, pemerintahan, dan politik, yang berkomitmen menjaga tata nilai, kedaulatan, dan kepentingan jangka panjang negara serta mengarahkan penyelenggaraan negara secara efektif, efisien, dan transparan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Created by: Sekolah Negarawan

Scan untuk informasi selengkapnya

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

KELUARGA BROKEN HOME

Analogi Struktur Ketatanegaraan

(berdasarkan Amandemen ke-4 UUD 1945)

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

ANALOGI STRUKTUR KETATANEGARAAN

(BERDASARKAN AMANDEMEN KEEMPAT UUD NRI 1945)



KREDITUR LUAR NEGERI (CHN - AS)
(Lelaki Simpanan)

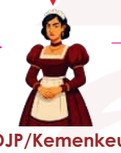

DJP/Kemenkeu
(Staff Asisten Rumah Tangga)






Cendikiawan Rohaniawan Budayawan Patriot



Elite Global/ Regional/ Nasional



RAKYAT
(Mantan Istri/ Janda)



HARTA



EKA
(Sila ke-1)



DWI
(Sila ke-2)



TRI
(Sila ke-3)



CATUR
(Sila ke-4)



PANCA
(Sila ke-5)





MPR
(Mantan Suami)



Pemerintah
(Presiden)
(Asisten Rumah Tangga)



DPR
(Pengawas Asisten Rumah Tangga)



Partai Politik
(Agen ART)



POLRI
(Satpam Dalam)



TNI
(Satpam Luar)

Keterangan Keluarga Broken Home:

a. MPR *(Mantan Suami)* meninggalkan Rakyat *(Mantan Istri/ Janda)* dan Pancasila *(Anak-anaknya)*
b. POLRI *(Satpam Dalam)* dan TNI *(Satpam Luar)* harusnya menjaga rumah, tetapi malah melindungi orang luar: Pemerintah/Presiden *(ART)*, DJP/Kemenkeu *(Staff ART)*, DPR *(Pengawas ART)* dan Partai Politik *(Agen ART)*.
c. DJP/Kemenkeu *(Staff ART)* meminjam uang dari Kreditur Luar Negeri *(Tetangga)* namun yang membayar utang tsb ialah Rakyat *(Istri)* sedangkan yang menikmati uang tsb ialah MPR *(Mantan Suami)*, Pemerintah/Presiden *(ART)*, DJP/Kemenkeu *(Staff ART)* dan DPR *(Pengawas ART)*.

Harta Rakyat diambil oleh MPR (Mantan Suami), Pemerintah/Presiden (ART),DJP/Kemenkeu (Staff ART), DPR (Pengawas ART),Partai Politik (Agen ART), Cendikiawan, Rohaniawan, Budayawan, Polri (Satpam Dalam), dan TNI (Satpam Luar),

Scan untuk Informasi Selengkapnya

INSTITUTE
Shiksha Jivanam Sadhayet

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

KELUARGA BAHAGIA

Analogi Struktur Ketatanegaraan

(berdasarkan Rancangan Perubahan ke-5 UUD NRI 1945)

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

ANALOGI STRUKTUR KETATANEGARAAN

(BERDASARKAN RANCANGAN PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 1945)

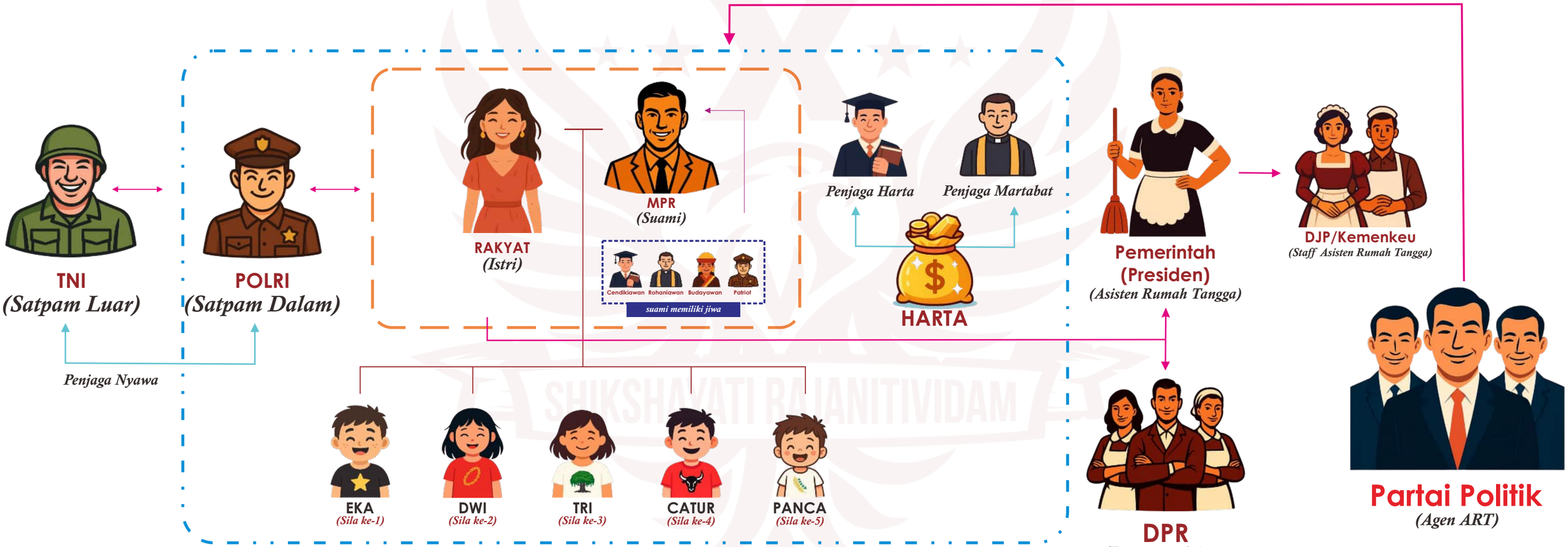

Keterangan Keluarga Bahagia:

- : Rumah Tangga
- : Keluarga

MPR *(Suami) harus memiliki sifat cendikiawan, rohaniawan, budayawan, dan patriot agar dapat mengajari Rakyat (Istri) dan Pancasila (anak-anaknya).*
Harta Rakyat kembali ke Rakyat

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

STRUKTUR KETATANEGARAAN

Kerajaan Majapahit

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

SEKOLAH NEGARAWAN X SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

STRUKTUR KETATANEGARAAN KERAJAAN MAJAPAHIT

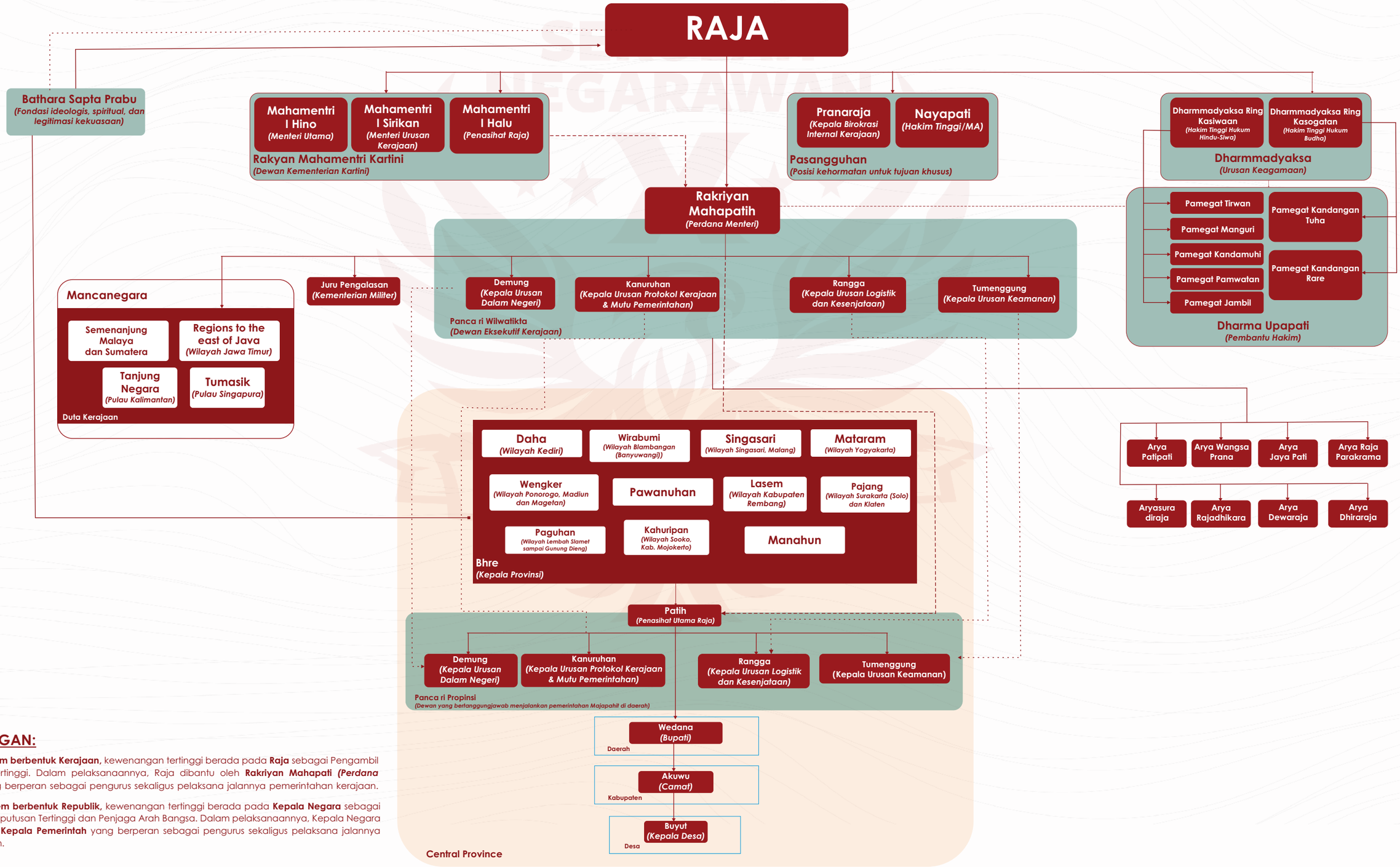

KETERANGAN:

1. Dalam sistem berbentuk Kerajaan, kewenangan tertinggi berada pada **Raja** sebagai Pengambil Keputusan Tertinggi. Dalam pelaksanaannya, Raja dibantu oleh **Rakriyan Mahapati *(Perdana Menteri)*** yang berperan sebagai pengurus sekaligus pelaksana jalannya pemerintahan kerajaan.

2. Dalam sistem berbentuk Republik, kewenangan tertinggi berada pada **Kepala Negara** sebagai Pengambil Keputusan Tertinggi dan Penjaga Arah Bangsa. Dalam pelaksanaannya, Kepala Negara dibantu oleh **Kepala Pemerintah** yang berperan sebagai pengurus sekaligus pelaksana jalannya pemerintahan.

INSTITUTE
Shiksha Jivanam Sadhayet

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

STRUKTUR KETATANEGARAAN NKRI

sebelum Amandemen UUD 1945

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

PADANAN STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM AMANDEMEN UUD NRI 1945 DENGAN STRUKTUR PERUSAHAAN BESAR (BIG CORPORATE)

(BERDASARKAN TEORI MANAJEMEN)

~~RAKYAT~~
~~SHAREHOLDERS~~

Rakyat (Pemegang Saham/ Shareholders) tidak ada

Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Board of Directors (BOD)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Board of Commissioners (BOC)

Presiden
Chief Executive Officer (CEO)

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Chief Audit Officer (CAO)

Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
Board of Advisors (BOA)

Ketua Mahkamah Agung (MA)
Chief Judicial Officer (CJO)

INSTITUTE
Shiksha Jivanam Sadhayet

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

STRUKTUR KETATANEGARAAN NKRI

setelah Amandemen ke-4 UUD 1945

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

PADANAN STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA SETELAH AMANDEMEN KE-4 UUD NRI 1945 DENGAN STRUKTUR PERUSAHAAN BESAR (BIG CORPORATE)

(BERDASARKAN TEORI MANAJEMEN)

~~RAKYAT~~
~~SHAREHOLDERS~~

Rakyat (Pemegang Saham/ Shareholders) tidak ada, hanya diwakili UUD 1945

~~Board of Directors (BOD)~~

Board of Directors (BOD) tidak ada, karena MPR tidak berfungsi sebagai BOD

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)	Presiden	Kekuasaan Kehakiman	Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) / Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)		Ketua Mahkamah Agung (MA) / Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) / Ketua Komisi Yudisial (KY)	
Board of Commissioners (BOC)	**Chief Executive Officer (CEO)**	**Chief Judicial Officer (CJO)**	**Chief Audit Officer (CAO)**

INSTITUTE
Shiksha Jivanam Sadhayet

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

STRUKTUR KETATANEGARAAN NKRI

versi Badan Pengkaji MPR RI

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

PADANAN STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA UUD NRI 1945 AMANDEMEN KE 5 VERSI BADAN PENGKAJI MPR RI DENGAN STRUKTUR PERUSAHAAN BESAR (BIG CORPORATE)

(BERDASARKAN TEORI MANAJEMEN)

~~RAKYAT~~
~~SHAREHOLDERS~~

Rakyat (Pemegang Saham/ Shareholders) tidak ada, hanya diwakili UUD 1945

~~Board of Directors (BOD)~~

Board of Directors (BOD) tidak ada, karena MPR tidak berfungsi sebagai BOD

Komisi Penegak Etik
Internal Audit & Integrity Board

Partai Politik
Recruitment Agency

Lembaga Perwakilan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Board of Commissioners (BOC)

Presiden
Chief Executive Officer (CEO)

Kekuasaan Kehakiman
Ketua Mahkamah Agung (MA) | Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) | Ketua Komisi Yudisial (KY)
Chief Judicial Officer (CJO)

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Chief Audit Officer (CAO)

Keterangan

Dokumen pendukung dapat didownload pada link berikut:
https://mpr.go.id/pengkajian/HKBP_NA_Rancangan_Perubahan_UUD_NRI_Tahun_1945_UPH.pdf

Dokumen pendukung dapat didownload pada QR Code

INSTITUTE
Shiksha Jivanam Sadhayet

SEKOLAH NEGARAWAN X
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

STRUKTUR KETATANEGARAAN NKRI

sesuai Rancangan Perubahan Kelima ke-5 UUD NRI 1945

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

PADANAN STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA SESUAI RANCANGAN PERUBAHAN KELIMA UUD NRI 1945 DENGAN STRUKTUR PERUSAHAAN BESAR (BIG CORPORATE)

(BERDASARKAN TEORI MANAJEMEN)

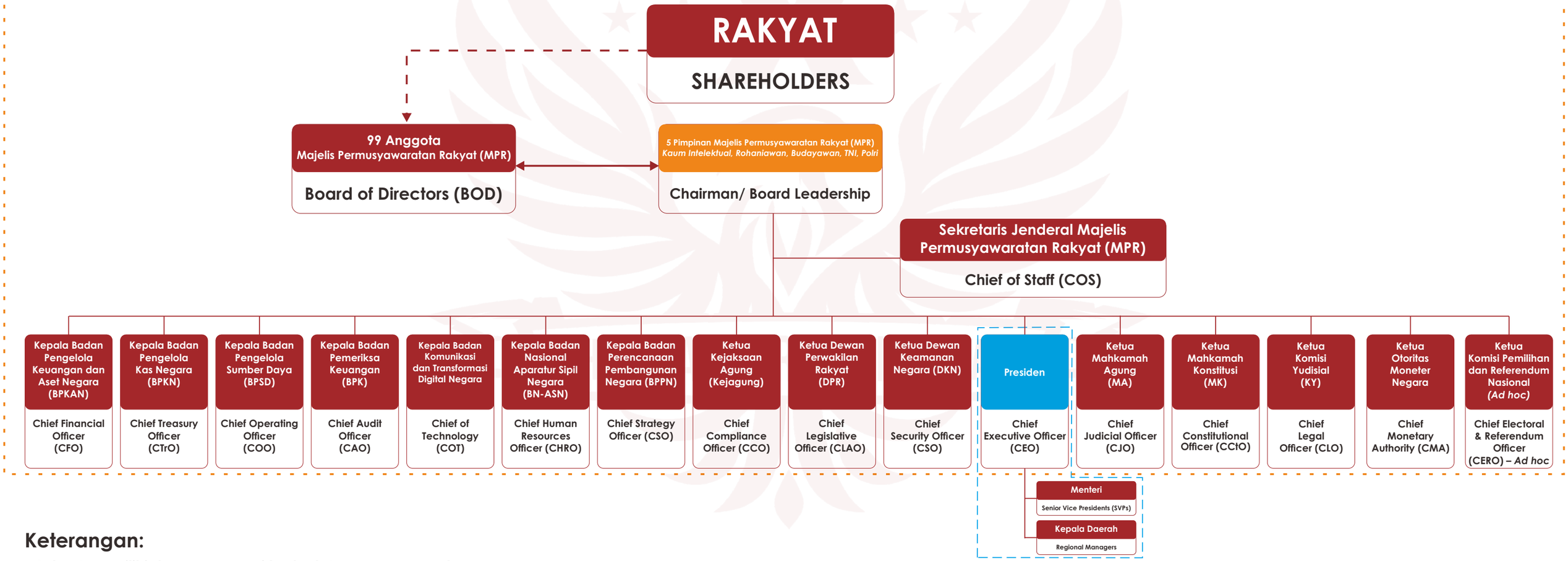

Keterangan:

- Rakyat memiliki dan menguasai kedaulatan secara penuh

: Lembaga Negara

: Lembaga Pemerintahan

Kepala Negara : Pimpinan MPR

Kepala Pemerintahan : Presiden

INSTITUTE
Shiksha Jivanam Sadhayet

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANTIVIDAM

6 OPSI MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT SEUTUHNYA

sesuai Rancangan Perubahan ke-5 UUD NRI 1945

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

6 OPSI UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN RAKYAT SEUTUHNYA MELALUI AMANDEMEN KELIMA UUD 1945

KEDAULATAN RAKYAT

1 DEKRIT PRESIDEN → Dekrit Presiden

2 KONVENSI NASIONAL → **a. Maklumat Dewan Inisiator**
1) Jika Dekrit Presiden tidak berhasil, maka dilaksanakan Maklumat Dewan Inisiator Konvensi (Gabungan tokoh bangsa, mahasiswa, rakyat)
2) Unit Maklumat Mempersiapkan Empat Pilar Bangsa untuk duduk bersama Kaum Kenegarawan
3) Segera dibentuk Panitia Konvensi
b. Pembentukan Panitia Konvensi
1) Anggota dari Intelektual, Agama, Budaya & TNI/POLRI
2) Fungsi Menyusun Tata Tertib, Agenda, dan Format Dokumen Hasil Konvensi
3) Akselerasi/ Segera dilaksanakannya Musyawarah Kenegarawan Nasional
4) Tetapkan Aturan Transisi Minimum agar Negara tetap berjalan

3 REFERENDUM RAKYAT → Referendum Menanyakan Langsung ke Rakyat

4 PERUBAHAN VIA PARLEMEN → Inisiatif DPR/MPR

5 REVOLUSI MASSA (PEOPLE POWER) → Revolusi Massa (People Power) di Istana Presiden dan Gedung DPR/MPR

6 KUDETA MILITER → Militer Mengambil Alih Kekuasaan

1. Pembubaran Seluruh Anggota DPR, MPR dan Partai Politik
a) Bentuk Panitia Penyelenggara Musyawarah Kenegarawanan Nasional. b) Bentuk Dewan Negara --> Pegang Fungsi Darurat. c) Tetapkan Aturan Transisi Minimum agar negara tetap berjalan

2. Musyawarah Kenegarawanan Nasional
a) Forum besar dihadiri tokoh-tokoh pilar bangsa, b) Agenda Utama: 1. Mengakui Krisis Struktur Ketatanegaraan 2. Menyepakati diperlukannya Amandemen Kelima UUD 1945, agar rakyat kembali berdaulat 3. Membentuk Dewan Negara

3. Pembentukan / Pelantikan Dewan Negara (Masa Transisi) Untuk Membuat Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945
a) Menyusun Struktur Ketatanegaraan baru & Draft Amandemen Kelima UUD 1945. b) Prinsip: Kedaulatan Rakyat, Perlindungan Nyawa, Harta dan Martabat, c) Membentuk MPRS

4. Konsultasi Publik / Semi-Referendum
a) Dengar pendapat luas, Polling Nasional & Uji Publik Draft. b) Legitimasi makin kuat tanpa harus menunggu Referendum Nasional Formal

5. Pembentukan / Pelantikan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Untuk Mengesahkan Amandemen Kelima UUD 1945
a) Mengesahkan UUD baru & Peraturan Peralihan, b) Mandat Utama: Membentuk MPR Definitif sesuai UUD Baru

6. Pembentukan / Pelantikan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Definitif
a) Dibentuk sesuai mekanisme dalam UUD Baru (Masa Jabatan misalnya 10 tahun). b) Berisi Negarawan dari 4 unsur pilar negara: Intelektual, Rohaniawan, Budayawan, dan TNI/POLRI.
c) Pimpinan MPR menjadi "Kepala Negara" secara kolektif kolegial, yang memegang mandat rakyat.

7. Membuat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
Menetapkan Arsitektur Negara dan Membangun Lembaga Tinggi Negara meliputi:
1. MPR Definitif menetapkan TAP MPR untuk membangun ulang lembaga tinggi negara:
a) Badan Perencanaan Pembangunan Negara b) Dewan Keamanan Negara c) Badan Pengelola Sumber Daya d) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara e) Badan Pengelola Kas Negara f) Badan Nasional Aparatur Sipil Negara
g) Badan Komunikasi dan Transformasi Digital Negara h) Kejaksaan Agung i)Kepresidenan j) Dewan Perwakilan Rakyat k) Badan Pemeriksa Keuangan l) Mahkamah Agung m) Mahkamah Konstitusi n) Komisi Yudisial
o) Komisi Pemilihan & Referendum Nasional (baru dibentuk) p) Otoritas Moneter Negara
2. Di TAP MPR juga diatur:
a) Susunan, Kewenangan, dan Tata Kerja masing-masing Lembaga Tinggi Negara
b) Verifikasi Ulang Partai Politik & Kanal Calon Independen
c) Anti-Konsolidasi Kekuasaan (Pembatasan Rangkap Jabatan, Konflik Kepentingan)

8. Pembubaran Dewan Negara (Penutupan Masa Transisi)
a) Dewan Negara dibubarkan, b) Sebagian anggota bisa masuk MPR, sisanya selesai. c) Transisi Aman karena Lembaga Tinggi Negara sudah terbentuk --> Rakyat Terlindungi.

9. Komisi Pemilihan & Referendum Nasional
a) Badan Teknokratik, Independen, Sistem Terbuka & Auditabel. b) Menyusun Kalender, Aturan, dan SOP Keamanan IT Pemilu & Referendum

10. Verifikasi Partai Politik & Kanal Independen
a) Pendaftaran Ulang semua Partai Politik sesuai UUD/TAP MPR. b) Pendaftaran Calon Independen --> termasuk untuk Presiden. c) Presiden (versi UUD baru) fokus melayani & mengatur rakyat bukan mencari rente pajak.

11. Penyusunan Tahapan Pemilu (Jadwal Pemilu)
a) Skema: bisa Legislatif dulu --> Presiden, atau serentak sesuai UUD baru. b) Semua dijalankan dengan sistem baru & lembaga baru.

12. Pemilu & Pelantikan
a) Pemilu diselenggarakan, hasil sah, Pelantikan Lembaga sesuai UUD Baru. b) Negara kembali berjalan normal dengan struktur Konstitusi yang baru.

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

KETIKA KONSTITUSI SALAH ARAH

KETIKA KONSTITUSI MENJADI MESIN YANG SALAH MENGHASILKAN OUTPUT NEGARA

Analisis Relasi Tujuan Negara, Desain Konstitusi, dan Realitas Output Nasional

INPUT

TUJUAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Sesuai Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alenia Ke-empat:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia

Target negara:
Negara adil, sejahtera, dan berdaulat rakyat

PROCESSOR

UUD NRI TAHUN 1945
HASIL AMANDEMEN KE-EMPAT

KONSTITUSI

- **Reduksi Kedaulatan Rakyat** (Pasal 1 ayat 2)
- **Konsentrasi Kekuasaan pada Presiden** (Pasal 4 ayat (1), Pasal 10, Pasal 17)
- Kedaulatan Dibajak Partai Politik (Pasal 6A)
- **Pelemahan lembaga permusyawaratan (MPR)**
- **Hilangnya Haluan Negara**
- **Negara Hukum Tanpa Tujuan Keadilan** (Pasal 1 ayat 3)

OUTPUT

REALITAS YANG BERBEDA DARI TUJUAN NEGARA

1. **- Konflik Sosial dan Polarisasi** oleh Partai Politik berlawanan dengan tujuan melindungi segenap Bangsa Indonesia
   - Dominasi Elite dan Partai Politik kedaulatan rakyat berubah menjadi kedaulatan oligarki partai politik
2. **Ketimpangan Ekonomi** berlawanan dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum
3. **Kualitas Pendidikan yang Belum Merata** berlawanan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. **Lemahnya Posisi Indonesia** dalam Tatanan Global berlawanan dengan tujuan ikut melaksanakan ketertiban dunia

INPUT	PROCESSOR	OUTPUT
Tujuan Negara Republik Indonesia	UUD NRI TAHUN 1945 (Hasil Amandemen Ke-empat)	Realitas Negara yang Menyimpang dari Tujuan Konstitusi

Jika Input Konstitusi Benar tetapi Output Negara Menyimpang, maka yang perlu diperbaiki adalah Processor Sistem Negara.

SCAN HERE

INSTITUTE
Shiksha Jivanam Sadhayet

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

PENJAJAHAN MODERN

Dari Elite Global ke Kehidupan Rakyat

PENJAJAHAN MODERN
DARI ELITE GLOBAL KE KEHIDUPAN RAKYAT

ELITE GLOBAL
LAPISAN PENGARUH & KONSENSUS DUNIA
KEUANGAN YANG MAHA KUASA



- *Agenda*
- *Konsensus*
- *Narasi Global*
- *Stabilitas Sistem*
- *Struktur Ketatanegaraan*

MULTILATERAL POLICY INSTITUTIONS
STANDAR, NORMA, BEST PRACTICES

THE BIG 4
AUDIT, PAJAK, DESAIN REGULASI
Deloitte. EY pwc KPMG

GLOBAL INVESTMENT GIANTS
MODAL, PEMBIAYAAN, INVESTASI
J.P.Morgan Vanguard STATE STREET BlackRock.

ELITE NASIONAL
TRANSLATOR & GATEKEEPER KEBIJAKAN



- *Politisi*
- *Teknokrat*
- *Birokrat Puncak*
- *Pengusaha Besar*

NEGARA
(INDONESIA SAAT INI)



PROGRAM PEMERINTAH
(IMPLEMENTASI KEBIJAKAN)

SDGs · APBN · ESG · OMNIBUS LAW · RPJMN
REFORMASI PAJAK · KURIKULUM SDM

RAKYAT



Rakyat hidup di negeri sendiri namun terperangkap dalam sistem global yang tidak mereka kuasai, bekerja semakin keras dan patuh pada aturan serta demokrasi prosedural, tetapi tetap kehilangan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan nyata.

"Kita sekarang mengalami penjajahan regulasi, jadi ini nanti caranya maling bukan ngambil duit, tetapi mengubah aturan yang disebut Penjajahan Regulasi"

- Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) -

SOLUSI PEMBEBASAN PERADABAN



ILMU TAUHID (AGAMA / KETUHANAN)



PEMAKNAAN & PENERAPAN
NILAI-NILAI PANCASILA



INSTITUTE

- PERUBAHAN STRUKTUR KETATANEGARAAN
- AMANDEMEN UUD NRI 1945 (KONSTITUSI)

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITTVIDAM

KONSPIRASI PROGRAM

Sustainable Development Goals (SDGs)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1 NO POVERTY
TANPA KEMISKINAN

2 ZERO HUNGER
TANPA KELAPARAN

3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

4 QUALITY EDUCATION
PENDIDIKAN BERKUALITAS

5 GENDER EQUALITY
KESETARAAN GENDER

6 CLEAN WATER AND SANITATION
AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
INDUSTRI, INOVASI, DAN INFRASTRUKTUR

10 REDUCED INEQUALITIES
BERKURANGNYA KESENJANGAN

11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB

13 CLIMATE ACTION
PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

14 LIFE BELOW WATER
EKOSISTEM LAUTAN

15 LIFE ON LAND
EKOSISTEM DARATAN

16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

GOALS FOR A NEW WORLD ORDER

17 GOALS TO ENSLAVE ALL PEOPLES

1 WELFARE DEPENDANCE
KETERGANTUNGAN BANTUAN PEMERINTAH

2 GENETICALLY MODIFIED FOOD
REKAYASA GENETIK MAKANAN

3 FORCED VACCINATIONS
VAKSINASI PAKSA

4 MASS INDOCTRINATION
INDOKTRINASI MASSAL

5 DESTROY FAMILY UNIT
PENGHANCURAN UNIT KELUARGA

6 WATER RATIONING
PENJATAHAN AIR

7 SMART GRID SURVEILLANCE
PENGAWASAN JARINGAN CERDAS

8 INDENTER & STATE-OWNED
BERHUTANG & DIMILIKI NEGARA

9 RESTRICTED TRANSPORT
TRANSPORTASI YANG DIBATASI

10 COMMUNISM
KOMUNISME

11 PRISON CITIES
KOTA PENJARA

12 CRYPTO-EURO & SOCIAL POINT
KRIPTO EURO & POIN SOSIAL

13 ECO-DICTATORSHIP & GEOENGINEERING
KEDIKTATORAN EKOLOGIS & REKAYASA GEO

14 CONTROL WILDLIFE
KONTROL SATWA LIAR

15 CONTROL RESOURCES
KONTROL SUMBER DAYA

16 PERPETUAL WAR & DISINTEGRATION
PERANG ABADI DAN IMIGRASI

17 ONE WORLD GOVERNMENT
SATU PEMERINTAHAN DUNIA

GOALS FOR A NEW WORLD ORDER

Source: Youtube SindoNews

INSTITUTE
Shiksha Jivanam Sadhayet

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

TAHAPAN MENUJU PERUBAHAN

Kelima UUD NRI Tahun 1945

TAHAPAN MENUJU PERUBAHAN KELIMA
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA (UUD NRI) TAHUN 1945

1
Filosofi Arsitektur Negara (Dasar Negara)







2
Denah Arsitektur Negara (Struktur Ketatanegaraan)







PENJELASAN LENGKAP

Playlist Cak Nun
Filosofi • Struktur • Konstitusi

TAHAPAN MENUJU PERUBAHAN KELIMA
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA (UUD NRI) TAHUN 1945

3 - Perencanaan Detail Teknis (UUD atau Konstitusi)

Teman-teman hukum PR-nya adalah tolong dipelajari apa bedanya negara dengan pemerintah...
Tingkat Yusril, tingkat Mahfud MD, tingkat Busro, itupun kalau saya ajak ngomong bedanya negara dengan pemerintah enggak ada yang nyaut, enggak ada yang nyambung.





Kenapa pemerintah ditaati? Padahal kamu itu buruh, kenapa harus ditaati? Padahal kamu itu dibayar oleh rakyat. Rakyatlah yang memiliki negara ini. Kamu itu dibayar, tapi kok malah memerintah?
Kamu itu gila atau bagaimana? Lha, orang dibayar kok dinamakan 'Pemerintah' (orang yang memerintah) itu bagaimana? Itu yang gila pemerintahnya, atau yang memberi nama?

Selama Indonesia tidak memperbaiki konstitusi dasar kenegaraannya, Anda akan mengeluh terus-menerus.
Pak Rektor akan bilang, 'Bagaimana ini, bukunya sudah sama tapi hasilnya kok tidak sama?





Mbok punya rencana masa depan... gini lho mestinya negara... gini loh mestinya pemerintah.
Anda sudah mendaftar kepada Allah. Untuk teman-teman Fakultas Hukum saya mohon dalam waktu 3 tahun. Ada buku dari anda semua, ada tim peneliti: 'Gini lho seharusnya Indonesia secara konstitusi dan hukum'. Kalau itu ada, besok anakmu tinggal pake, kalau enggak, anakmu yang bikin lagi

Pesan Penutup

Yang saya inginkan adalah Indonesia ke depannya dipimpin oleh anak-anak yang lebih benar, lebih matang, dan lebih bijaksana.

Tidak saling sikut atau bertengkar demi membela kebenaran masing-masing, tetapi memiliki kebijaksanaan untuk masa depan.

Hanya itu saja yang saya minta. Makanya, sejak tahun '79 saya sudah menulis buku 'Indonesia Bagian dari Diri Saya'...



PENJELASAN LENGKAP

Playlist Cak Nun
Filosofi • Struktur • Konstitusi

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANTIVIDAM

PERSAMAAN STRUKTUR KETATANEGARAAN IRAN

dan Konsep Sekolah Negarawan

PERSAMAAN STRUKTUR KETATANEGARAAN IRAN DAN KONSEP SEKOLAH NEGARAWAN

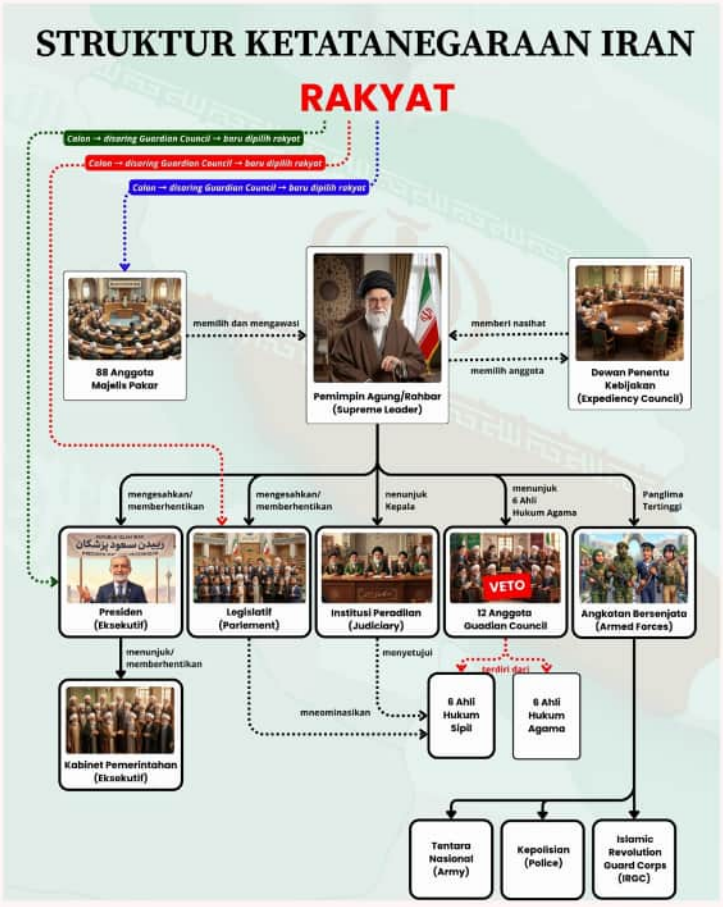



No	Aspek	Iran	Konsep Sekolah Negarawan	Persamaan
1	Kedaulatan rakyat	Rakyat memilih Majelis Pakar	Rakyat memilih MPR	Kedaulatan tetap berasal dari rakyat dan dijalankan melalui perwakilan
2	Lembaga tertinggi	Majelis Pakar	MPR	Sama-sama menjadi lembaga tertinggi penentu arah bangsa
3	Penentu arah negara	Majelis Pakar menentukan arah strategis	MPR menentukan arah jangka panjang	Arah negara ditentukan lembaga perwakilan, bukan pemerintah
4	Struktur Anggota Lembaga Tertinggi	88 ulama	99 orang dari 4 pilar penjaga kedaulatan (Kaum intelektual, rohaniawan, budayawan/tokoh adat istiadat, dan TNI-Polri)	Sama-sama berisi tokoh yang dianggap mewakili kepentingan rakyat
5	Kepala negara	Supreme Leader	Pimpinan MPR	Ada posisi di atas Presiden yang mengawasi dan menentukan arah
6	Peran Presiden	Kepala pemerintahan	Kepala pemerintahan	Presiden hanya menjalankan kebijakan, bukan penentu arah utama
7	Fungsi Presiden	Mengusulkan kebijakan tapi tidak mengesahkan kebijakan	Mengusulkan kebijakan tapi tidak mengesahkan kebijakan	Tidak memiliki kewenangan akhir dalam penetapan aturan
8	Kontrol militer	Di bawah Supreme Leader	Di Dibawah Pimpinan MPR (Melalui Dewan Keamanan Negara)	Militer tidak berada di bawah Presiden
9	Fungsi militer	Melindungi negara	Melindungi negara	Militer sebagai alat negara, bukan alat pemerintah
10	Pemisahan negara & pemerintah	Ada pemisahan jelas	Ada pemisahan jelas	Negara sebagai penentu arah, pemerintah sebagai pelaksana

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

USULAN STRUKTUR PEMERINTAH PUSAT & DAERAH

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

USULAN STRUKTUR PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH

KEPRESIDENAN

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

REGIONAL I (Nusantara Barat)
- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Utara
- Provinsi Sumatera Barat
- Provinsi Riau
- Provinsi Kepulauan Riau

REGIONAL II (Sumatera Tengah)
- Provinsi Jambi
- Provinsi Sumatera Selatan
- Provinsi Bengkulu
- Provinsi Bangka Belitung
- Provinsi Lampung

REGIONAL III (Jawa Raya)
- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Banten
- Provinsi Jawa Barat
- Provinsi DI Yogyakarta
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Jawa Tengah

REGIONAL IV (Kalimantan)
- Provinsi Kalimantan Barat
- Provinsi Kalimantan Tengah
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Provinsi Kalimantan Utara

REGIONAL V (Sulawesi)
- Provinsi Sulawesi Barat
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Provinsi Sulawesi Tenggara
- Provinsi Sulawesi Utara
- Provinsi Gorontalo

REGIONAL VI (Nusa Tenggara & Bali)
- Provinsi Bali
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Provinsi Nusa Tenggara Timur

REGIONAL VII (Maluku & Papua)
- Provinsi Maluku
- Provinsi Maluku Utara
- Provinsi Papua Barat Daya
- Provinsi Papua Barat
- Provinsi Papua Tengah
- Provinsi Papua Pegunungan
- Provinsi Papua Selatan
- Provinsi Papua

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

STRUKTUR HUBUNGAN MPR, DPR, PEMERINTAH PUSAT, DAN PEMERINTAH DAERAH

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

SEKOLAH NEGARAWAN X SHIKSHAYATI RAJANITIVIDAM

STRUKTUR HUBUNGAN MPR, DPR, PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

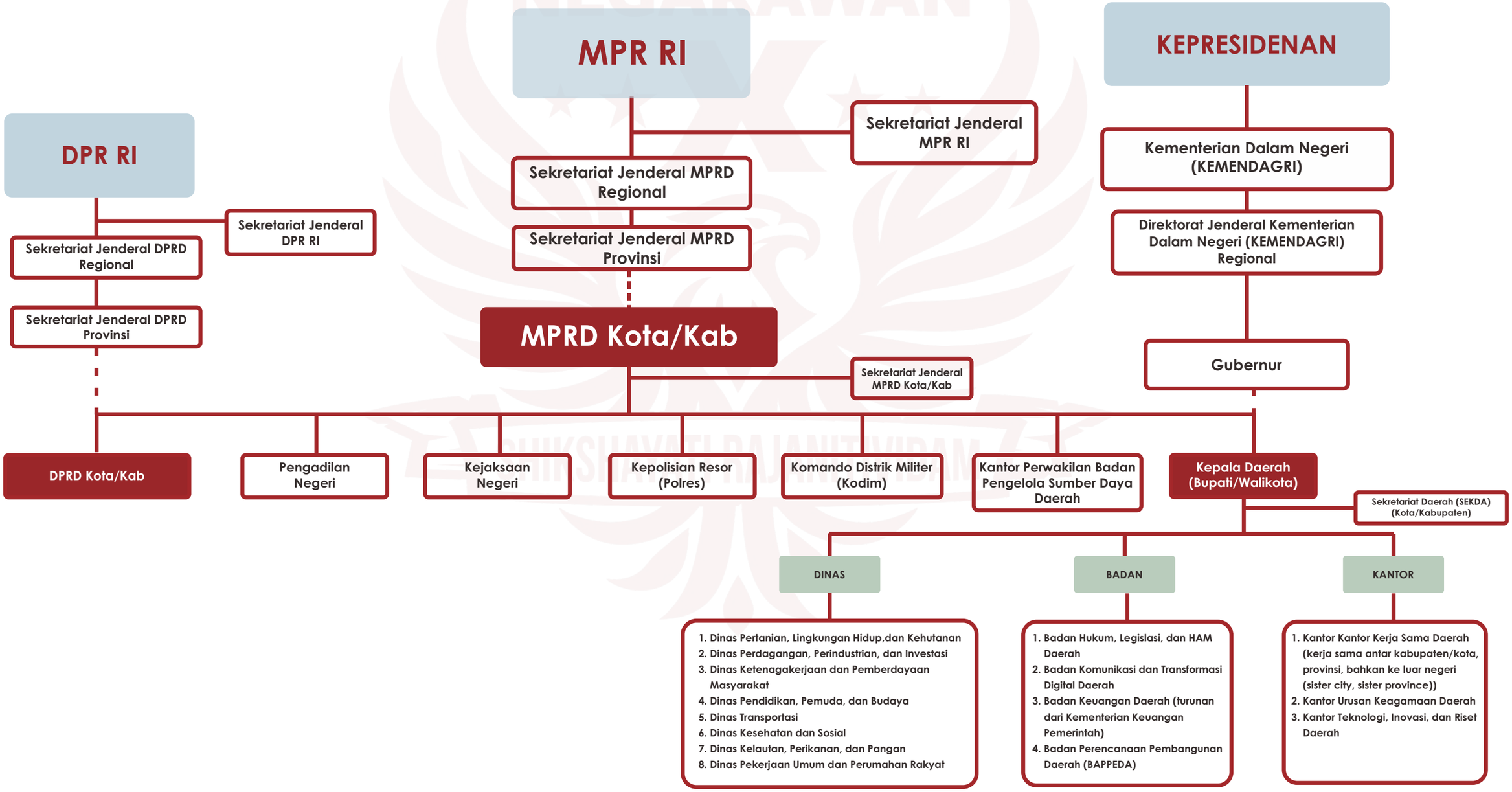

INSTITUTE
Shiksha Jivanam Sadhayet

SEKOLAH NEGARAWAN
SHIKSHAYATI RAJANTIVIDAM

STRUKTUR HUBUNGAN MPR & PEMERINTAH DAERAH

INSTITUTE
SHIKSHA JIVANAM SADHAYET

SEKOLAH NEGARAWAN
Shikshayati Rajanitividam
Menara Karya 28th Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta 12950
Telp. 0811 35 2211 E-mail. info@sekolahnegarawan.id

STRUKTUR HUBUNGAN MPR DAN PEMERINTAHAN DAERAH

